

POLITIK POPULISME NURDIN ABDULLAH: DARI BANTAENG MENUJU SULSEL-01

¹Ade Irma Surani Haliq, ²Reksa Burhan, ³Sunardi

¹Universitas Muhammadiyah Palopo

²STISIP Veteran Palopo

³Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Email:

¹dedesuriany@umpalopo.ac.id

²reksaburhan@stisipveteran.ac.id

³sunardi@iainpalu.ac.id

Abstrak

Wajah demokrasi di Indonesia saat ini mulai mengarah pada kemunculan (aktor) populisme dalam demokrasi di Indonesia. Sejumlah studi yang ada telah banyak menyimpulkan mengenai kebangkitan populisme sebagai salah satu fenomena dalam demokrasi elektoral. Artikel ini, akan melihat bagaimana wujud dan pola populisme yang dimainkan oleh aktor di tingkat lokal dalam arena demokrasi elektoral. Dengan mengambil studi kasus, pada Sulawesi Selatan. Kemunculan Nurdin Abdullah sebagai aktor politik yang populis berhasil memenangi pertarungan elektoral di tingkat lokal. Dengan menggunakan studi literatur, artikel ini membangun argumen. Meski populisme tidak bertentangan dengan demokrasi, tapi populisme juga memiliki sejumlah keterbatasan. Populisme menguat ketika institusi -institusi sosial dan politik bermasalah secara fungsional, sehingga kemunculan sosok aktor politik yang kharismatik menjadi alternatif yang sulit dihindari.

Kata Kunci: Politik, Populisme, Demokrasi.

Abstract

The face of democracy in Indonesia is now starting to lead to the emergence of populism in democracy in Indonesia. A number of existing studies have concluded about the rise of populism as a phenomenon in electoral democracy. This article will look at the forms and patterns of populism played by actors at the local level in the arena of electoral democracy. By taking a case study, in South Sulawesi. The emergence of Nurdin Abdullah as a populist political actor won the electoral battle at the local level. By using a literature study, this article builds an argument. Although populism does not contradict democracy, populism also has its limitations. Populism strengthens when social and political institutions are functionally problematic, so the emergence of charismatic political actors is an unavoidable alternative.

Keywords: Politics, Populism, Democracy.

PENDAHULUAN

Wajah demokrasi di Indonesia saat ini mulai mengarah pada kemunculan (aktor) populisme dalam demokrasi di Indonesia. Populisme di Indonesia di demokrasi ini tidak bersifat ideologis, melainkan strategi politik untuk mendekatkan diri kepada masyarakat.

Oleh karena itu, demokrasi yang semula hanya dipenuhi oleh aktor dominan (elitis) menjadi bergeser ke aktor alternatif.

Dalam survey assessment terhadap proses demokrasi yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh Power Welfare & Democracy (PWD) Universitas

Gadjah Mada dan Oslo University terdapat satu temuan menarik yaitu tentang kecenderungan penguatan politik berbasis figur dan munculnya populisme.

Dikatakan dalam temuan PWD bahwa kecenderungan munculnya politik berbasis figur mengarah pada figur yang menduduki posisi publik seperti pimpinan daerah. Dalam rangka menjadi legitimate dan autoritatif pimpinan daerah tersebut menggunakan modal ekonomi dan otoritas individual/modal sosial. Kemudian temuan aktor dominan untuk menjadi legitimate dan autoritative memiliki kecenderungan dalam penggunaan clientilisme meskipun tidak secara serta merta. Hal tersebut berkaitan dengan temuan selanjutnya mengenai kecenderungan penggunaan populisme disamping penggunaan politik klientilisme. Secara nasional penggunaan populisme sebanyak 47% aktor dominan dan 31% untuk aktor alternatif. Penggunaan populisme dalam pandangan PWD dalam rangka untuk memobilisasi dan mengorganisasi dukungan.

Tidak hanya pada skala nasional pada tingkat lokal daerah, ditemukan bahwa terdapat penggunaan skema

populisme di berbagai daerah tinggi meskipun masih juga terdapat praktik patronase. Misalnya saja pada daerah Balikpapan, aktor dominan/kepala daerah menggunakan populisme sebesar 74% Disusul dengan Pekalongan dengan penggunaan populisme sebesar 70%.

Kemunculan Populisme Nurdin Abdullah

Salah satu fungsi penting pemerintah adalah menjamin ketersediaan pelayanan publik bagi seluruh warga masyarakat. Permasalahannya, akses untuk memperoleh pelayanan ini tidak selalu merata bagi masyarakat. Dalam konteks melemahnya peran negara, persaingan di antara aktor -aktor politik seringkali berfokus pada upaya menyediakan solusi pemenuhan kebutuhan publik secepat mungkin yang dapat langsung dinikmati masyarakat. Praktik -praktik semacam ini melahirkan dua jenis relasi kekuasaan, yakni yang bercorak patronase dan yang bercorak populisme. Patronase muncul dalam relasi kekuasaan antara patron dan klien, di mana patron memberikan berbagai manfaat material dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada klien dan sebaliknya, klien memberikan kesetiaan dan dukungannya sebagai imbal jasa

kepada patron (Aspinall, 2013). Sementara itu, populisme muncul ketika para aktor politik berupaya membangun kedekatan hubungan dengan warga masyarakat atau konstituennya melalui program-program yang berpihak pada aspirasi publik (Weyland, 2001). Kendati secara konseptual berbeda, tapi keduanya menjadi strategi yang digunakan para aktor politik untuk mendekatkan hubungan dengan masyarakat, khususnya dalam konteks politik di mana sistem distribusi kesejahteraan belum berjalan dengan baik.

Nurdin Abdullah muncul dengan beberapa kebijakannya yang populer dan dianggap sebagai sebuah terobosan. Sebagai kepala daerah yang memiliki gelar akademik Profesor dalam bidang ilmu pertanian, Nurdin selalu punya terobosan atau pun ide di bidang pertanian dalam rangka mengembangkan potensi pertanian di wilayah Bantaeng. Ia pernah mencetuskan Bantaeng sebagai Kabupaten Benih berbasis teknologi. Ia pun sempat merevitalisasi kelompok tani di Kabupaten Bantaeng dengan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kelompok tani berbadan hukum. Melalui sinergisitas

lintas sektor, Nurdin berusaha mengembangkan kawasan agrowisata uluere dan di bidang pertanian sendiri, Nurdin fokus pada pengembangan tanaman apel, strawberry, tanaman sayuran organik seperti kentang dan tanaman hias.

Melalui kebijakan-kebijakannya, Nurdin tak hanya fokus pada bidang pertanian saja tapi ia menaruh perhatian yang sama pada sektor peternakan di Kabupaten Bantaeng. Melalui teknologi Inseminasi Buatan, Nurdin mengeluarkan kebijakan untuk memperbaiki kualitas ternak sapi. Selain itu, ia pun mendukung penuh pemanfaatan limbah ternak menjadi biogas yang dapat digunakan sebagai energi alternatif di desa-desa Kabupaten Bantaeng.

Pertumbuhan bidang ekonomi di Bantaeng sebelum dirinya menjabat sebagai Bupati pada tahun 2008, Bantaeng termasuk 199 daerah tertinggal di Indonesia. Tiap tahun dilanda banjir, infrastruktur dan layanan kesehatannya pun dinilai sangat buruk, pertumbuhan ekonominya pun saat itu hanya 4,7 persen saja.

Namun dengan kemampuan yang dimilikinya, daerah yang memiliki luas 395,83 Km atau tak lebih besar dari

Pulau Madura itu berhasil diubah dan ditingkatkan perekonomiannya. Nurdin mensiasati APBD sebesar Rp 821 miliar dengan menggalang sumber lain.

Selama 7 tahun ia bekerja keras untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng dan hasilnya memang mengalami pertumbuhan dari 4,7 persen menjadi 9,2 persen di tahun 2015, dan kini Bantaeng menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.

Sejak Nurdin menjabat sebagai Bupati Bantaeng, perubahan dalam bidang pelayanan kesehatan pun sangat terasa. Ia menciptakan layanan kesehatan 'mobile ambulans' yang beroperasi selama 24 jam. Nurdin memodifikasi mobil Nissan Elgrand yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang untuk dijadikan ambulans. Prestasi itu bahkan terdengar sampai ke luar negeri seperti, yaitu Amerika Serikat. Konsul Jenderal Amerika Serikat Joaquin Monserrate terbang ke Bantaeng pada akhir 2014 lalu untuk melihat langsung pertumbuhan ekonomi dan layanan kesehatan ala Nurdin.

Dan kini boleh dikata, selama masa kepemimpinannya Kabupaten Bantaeng yang sekarang bukan lagi Kabupaten

Bantaeng yang dulu, pembangunan di Kabupaten tersebut mulai terlihat nyata. Pemerintah Kabupaten Bantaeng pun secara rutin mengirimkan putra-putri terbaiknya dalam berbagai macam ajang/lomba yang diselenggarakan di kota lain.

METODE

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan tentang bagaimana dinamika populisme di tingkat elektoral pada prosesi demokrasi, seperti pemilihan Gubernur di Sulawesi Selatan. Menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan melakukan beberapa langkah. Pertama, penulis melakukan penelusuran data dan informasi. Penelusuran data dan informasi dilakukan dengan cara mengamati perkembangan politik di tingkat lokal. Perhatian utama peneliti tertuju pada aktifitas aktor, dalam hal ini Nurdin Abdullah. Kedua, penulis melakukan studi literatur. Beberapa kajian terkait dengan tema populisme, penulis kumpulkan kemudian melakukan review dan melakukan kontekstualisasi dengan kasus yang sedang kami teliti. Tahap terakhir, adalah melakukan interpretasi. Untuk meminimisir terjadinya

subyektifitas penulis, maka kami melakukan triangulasi dengan membandingkan berbagai sumber informasi yang telah kami terima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Populisme

Ditinjau dari segi bahasa, kata "Populisme" berasal dari bahasa Romania yaitu "populis" yang berarti rakyat. selain itu dalam literatur bahasa latin yaitu "popus" yang juga berarti populis. Kalimat Populisme sendiri dalam banyak literatur selalu dikatakan sebagai istilah yang susah untuk didefinisikan mengingat kelonggaran yang dapat melewati berbagai pembelahan ideologi, baik kanan maupun kiri. namun bukan berarti tidak ada titik equilibrium dalam menerjemahkan apa itu populisme. Titik tersebut dapat dilihat melalui 4 Karakteristik yaitu, tema sentral seputar rakyat, mereka mengkritik elit. mereka memahami bahwa rakyat adalah entitas yang homogen dan mereka menyatakan adanya krisis yang serius.

Aktor populis berargumen bahwa pengaruh politik, identitas cultural atau situasi ekonomi mengancam rakyat biasa dan harus dilindungi. tidak peduli krisis itu benar atau tidak. (Rooduijn, De Lange & Van de Burg, 2012) berpendapat

bahwa populisme itu adalah hal yang bersifat menular. Hal tersebut disimpulkan atas temuannya mengenai partai-partai di Eropa Barat. Banyak program partai-partai yang populis di Eropa Barat adalah hasil penularan secara tidak langsung atas kesuksesan yang diraih. lebih lanjut dalam tulisan Roduijn dampak dari penularan populisme tersebut menurut Mudde adalah hasil dari penggunaan retorika populis yang meningkat dari partai populis kemudian dicontoh partai lainnya.

Sistem kepartaian di Eropa sangat tinggi, tidak heran di Indonesia memiliki kecenderungan yang sama dengan kasus Eropa Barat yaitu penularan populisme. Perbedaanya adalah bahwa kecenderungan skema politik pada saat ini berbasis individual atau "figure based politics" bukan pada skema partai. Sebut saja I Gede Winase di Bali, Idham Samawi di Bantul, Fadel Muhammad di Gorontalo, Gamawan Fauzi di Solok, Jokowi di Solo dan Jakarta, Tri Rismaharini di Surabaya, Ridwan Kamil di Bandung, Basuki Tjahaya Purnama di DKI, dan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Jokowi, Ridwan Kamil, Tri Rismaharini, Ganjar dan Ahok, mereka mendapat sorotan paling banyak dari publik.

Populisme sendiri muncul sebagai alternatif lain seperti halnya patronase. Aktor dominan (kepala daerah) terlihat sedang gencar-gencarnya mengembangkan dan memperkuat populisme. Jika pada patronase, untuk menjadi pemimpin politik yang legitimate dan otoritatif maka sumber daya ekonomi dan sumber daya sosial yang baik menjadi andalan penguatan hubungan patronase. Pada proses penguatan populisme yang digunakan pemimpin politik cenderung menjadikan program-program politik untuk menarik perhatian publik sehingga dapat dikonversi menjadi dukungan bagi elit. Berbicara populisme sebenarnya belumlah menemui titik kesepakatan antara para ilmuwan. Namun setidaknya terdapat tiga variasi dalam definisi populisme yaitu populisme sebagai ideologi, populisme sebagai discursive style, dan populisme sebagai strategi.

Sebagai strategi politik sendiri, populisme memfokuskan diri pada metode dan instrumen kemenangan dengan penggunaan power atau kekuasaan. selain itu titik tekan pada populisme sebagai sebuah strategi politik ada pada pilihan kebijakan, organisasi politik dan kerangka mobilisasi. Selain

itu, karakteristik dari populisme sebagai strategi politik, calon atau penguasa yang memiliki legitimasi memiliki kapabilitas dalam berkuasa. untuk memenangkan dan menjaga power-nya di pemerintahan, masing-masing aktor politik dapat menggunakan strategi yang berbeda-beda. Adapun strategi yang berbeda-beda tersebut dapat dilihat dari tipe aktor yang mendasari. Secara sederhana untuk membedakannya, kita dapat mengklasifikasikan aktor politik dala 3 tipe yaitu; Individual, Kelompok Informal dan Organisasi Formal. Kemudian terdapat dua basis kekuasaan yaitu pada angka (unggul dalam pemilu) dan pengaruh khusus (pengaruh sosio ekonomi atau militer).

Menurut Weyland kemunculan populisme ketika terdapat upaya aktor politik untuk menjalin kedekatan hubungan dengan warga masyarakat dan konstituennya dengan menggunakan program-program yang berpihak pada aspirasi publik. Hal ini berarti secara tidak langsung Weyland juga menganggap populisme sebagai sebuah strategi politik. Selain strategi menggunakan program-program yang sesuai dengan aspirasi publik. dapat juga menggunakan mobilisasi massa.

Mobilisasi massa yang dilakukan dapat berupa terorganisir atau tidak terorganisir/neo-populisme. Populisme dengan strategi mengorganisir massa dicirikan dengan menggunakan organisasi, media (TV, Media sosial, Surat Kabar, dll). Berikut merupakan ilustrasi dari populisme sebagai strategi politik:

Karakter Politik Masyarakat Adat Bantaeng

To-manurung menurut (Ahimsa Putra: 2014) adalah merupakan nilai-nilai budaya dan filsafat politik lokal di Sulawesi Selatan yang berdasarkan atas tafsir dan analisis sebuah mitos politik (political myth) yang sangat populer di Sulawesi Selatan di masa lampau. Versi mitos ini begitu banyak dan persebarannya juga hampir merata di kawasan Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, dapat diasumsikan di sini bahwa nilai-nilai budaya politik yang tersurat maupun tersirat di dalamnya merupakan nilai-nilai yang dipandang penting dalam kehidupan masyarakat di kawasan tersebut, yakni masyarakat Bugis dan Makassar.

Dari beberapa mitos To-manurung yang berhasil diperoleh di Sulawesi Selatan, mitos To-manurung dari Bantaeng dapat dikatakan merupakan mitos yang paling panjang, dan juga

paling lengkap. Oleh karena itu pula, menurut Ahimsa Putra bahwa mitos ini menyimpan lebih banyak nilai-nilai budaya Bugis dan Makassar dibandingkan dengan mitos-mitos To-manurung lainnya. Lebih dari itu, beberapa informan di Sulawesi Selatan (di antaranya adalah almarhum Mattulada, guru besar antropologi dari Sulawesi Selatan) mengatakan bahwa walaupun kerajaan Bantaeng tidak besar, tetapi dia adalah yang tertua. Jika demikian maka mitos To-manurung dari Bantaeng tentunya menyimpan informasi yang sangat awal tentang sistem politik tradisional di Sulawesi Selatan.

Menurut Analisis dan tafsir atas mitos To-manurung dari Bantaeng yang dikemukakan oleh Ahimsa Putra (2014) ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, mitos tersebut menunjukkan dengan jelas kandungan nilai-nilai budaya politik di dalamnya. Nilai politik yang terkandung di antaranya adalah (1) nilai resiprositas; (2) nilai kebersamaan; (3) nilai kesepakatan; (4) nilai perwakilan; (5) nilai restu nenek-moyang dan (6) nilai mengenai benda pusaka dan mimpi. Kedua, sebagian nilai-nilai budaya politik ini merupakan nilai-nilai budaya dalam sistem politik yang demokratis seperti misalnya nilai budaya perwakilan,

kesepakatan, dan kerja sama. Nilai budaya kepemimpinan di Sulawesi Selatan juga menunjukkan bahwa pemimpin yang baik adalah yang menghargai proses pengambilan keputusan secara musyawarah yang melibatkan semua pihak dan hasil yang dicapai dapat disepakati bersama serta dilaksanakan bersama pula. Ciri sistem politik tradisional Bantaeng ini sangat mirip dengan ciri sistem politik demokrasi di masa kini, yaitu demokrasi perwakilan dengan kepemimpinan yang demokratis.

Ketiga, sebagian nilai budaya politik dalam mitos *To-manurung* dari Bantaeng merupakan nilai budaya yang tidak terdapat dalam sistem politik demokrasi di masa kini dan ini membuat sistem politik tersebut tidak sepenuhnya terlihat modern. Nilai budaya tersebut adalah nilai budaya restu dari nenek moyang, nilai budaya pemilikan pusaka serta nilai budaya mimpi.

Keempat, kombinasi nilai-nilai budaya yang demokratis dengan nilai-nilai budaya yang lain tersebut membentuk sebuah sistem budaya dan falsafah politik yang dapat disebut sebagai sistem politik dan falsafah Demokrasi *To-manurung*.

Kebijakan Populis Nurdin Abdullah: Dari Bantaeng menuju SulSel-1

Sebelum kepemimpinan Nurdin Abdullah, Kabupaten Bantaeng hanya dipandang sebelah mata dibanding 23 kabupaten di Sulawesi Selatan. Namun, sejak tahun 2009, Bantaeng menjadi daerah yang cukup menonjol. Investor kelas dunia berdatangan ke kabupaten yang jaraknya 120 kilometer dari Makassar ini.

Banyak kiprah yang telah Nurdin Abdullah lakukan untuk Bantaeng. Awalnya beliau memiliki keengganan untuk memimpin Bantaeng. Desakan masyarakatlah yang meluluhkan hatinya untuk menata kotanya. Sebelum mengemban amanah sebagai Bupati, beliau adalah seorang akademisi dan pengusaha yang sempat memimpin 4 perusahaan Jepang. Tidak mudah baginya untuk melepaskan seluruh kemapanan yang dia miliki untuk memulai menata sebuah kabupaten kecil dengan luas yang hanya 0,63 % dari total luas Provinsi Sulawesi Selatan. Ada satu yang menarik dari perkataannya, "Jika ingin disenangi masyarakat, buatlah baliho di hati masyarakat". Banyak tantangan yang menghadang pada masa-masa awal kepemimpinannya. Nurdin

Abdullah langsung dihadapkan pada masalah banjir yang setiap tahun kerap melanda Bantaeng. Di tengah hadangan para lawan politiknya, beliau teguh menjalankan pembangunan cekdam. Hasilnya sangat nyata. Bantaeng bebas dari bencana banjir di musim hujan, sekaligus bebas dari bencana kekeringan di musim kemarau.

Awal-awal memimpin, Nurdin mengakui banyaknya persoalan di daerahnya. Mulai dari infrastruktur, kemiskinan, pengangguran, banjir rutin setiap tahun dan layanan publik. Pelan-pelan masalah-masalah itu diatasi.

"Kami normalisasi sungai dan drainase lalu membangun cekdam, membangkitkan petani dengan ketersediaan pupuk, benih unggulan dan irigasi pertanian di daerah-daerah terisolir dan menggeliatkan perekonomian Bantaeng dengan membuka pintu masuk bagi para investor" (detikcom, 9/13)

Nurdin Abdullah juga membuka kesempatan bagi para investor kelas dunia untuk berbisnis di Bantaeng. Nurdin menyiapkan lahan sekitar 1.000 hektar di daerah Pajjukukkang yang tuntas di tahun 2015 untuk pabrik smelter yang dibangun investor Jepang, Cina dan India. 2.000 hektar untuk relokasi industri dari Jepang. Rencananya pula, Ehime Toyota akan membangun sekolah mekanik untuk

wilayah Asia Pasifik dan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) berstandar internasional.

"Triliunan uang investor masuk ke Bantaeng tanpa ada pungutan sepeser pun. Kita menerapkan pelayanan one day service, proses perizinan selesai dalam sehari tanpa pungutan. Investor kita jemput di bandara lalu kita antar sampai ke Bantaeng, kita mengelola keuangan daerah secara terbuka dan transparan, buktinya tidak ada pejabat saya yang korupsi," (Detikcom, 9/13)

Di tahun pertama kepemimpinannya, Nurdin Abdullah melakukan pembenahan dan peningkatan kapasitas aparat-aparatnya dengan menerapkan pola assesment dengan melibatkan Universitas Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jatinangor. Sistem lelang jabatan di kepemimpinan Nurdin sudah dilakukan sejak tahun 2009, lebih awal dibandingkan yang dilakukan Jokowi sebagai Gubernur DKI.

Di rumah dinas dan rumah pribadi Nurdin, siapa pun warga Bantaeng bebas masuk ke dalam rumah tanpa ada hambatan. Baik untuk mengadu atau sekadar mengusulkan program. Saat menerima pengaduan warganya, bupati bergelar profesor Ilmu Kehutanan Universitas Hasanudin ini sesegera mungkin menyelesaikan persoalan

warga dengan melibatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

"Selama 6 tahun ini, sudah banyak pejabat yang saya copot, seperti Kepala Badan Kepegawaian Daerah sudah berganti empat kali, wakil bupati saya itu beberapa kali ikut lelang jabatan, kalau ada pejabat yang macam dan dilapori warga saya akan copot langsung, saya dekat dengan semua warga Bantaeng," (Detikcom 9/13)

Di periode pertama, Nurdin berhasil duduk sebagai bupati dengan raihan persentase suara sebanyak 46%, meskipun tanpa kampanye yang meriah. Nurdin yang 'pulang-kampung' demi amanah almarhum ayahnya, Nurdin berhasil mengungguli para kandidat yang sudah lama berkiprah di Bantaeng. Di periode kedua, tanpa kampanye dan atribut, Nurdin melenggang-kangkung dengan meraih suara 84% dalam Pilkada 2013 silam.

Di kepemimpinan alumni fakultas pertanian Universitas Kyushu di Jepang ini perekonomian Bantaeng tumbuh dari 5,3 persen menjadi 8,9 persen pertahun serta berhasil meningkatkan indeks pendapatan perkapita warga Bantaeng dari Rp 5 juta menjadi Rp 14,7 juta. Selain itu pula, Nurdin juga berhasil menghapus angka kematian ibu melahirkan di Bantaeng sebelum

kepemimpinannya, sebanyak 12 ibu per tahun.

Nurdin berhasil memajukan kembali varietas sayur-sayuran dan buah Bantaeng dan hasil-hasil perikanan, dengan konsep Agri-Marine Economy. Berkat kemajuan perekonomian di Bantaeng, terjadi arus balik warga Bantaeng yang merantau di luar, serta bertambahnya penduduk yang bermigrasi ke Bantaeng.

Bupati yang menjunjung tinggi filosofi Jepang pantang berbohong, disiplin, sesuai kata dan perbuatan ini juga berhasil membenahi sistem pelayanan kesehatan warganya. Di Bantaeng, setiap warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan gratis, cukup menghubungi call center 113, maka dokter dan perawat beserta mobil ambulance akan segera menjemput pasien di rumahnya.

Dengan Brigade Siaga Bencana (BSB), Nurdin menyiagakan 24 jam, 20 dokter, 16 perawat dan 8 unit mobil ambulance berfasilitas emergency hibah dari Jepang. Selain itu pula, BSB Bantaeng juga menyiagakan 11 unit mobil pemadam kebakaran berstandar Internasional, yang kemampuannya melebihi armada yang dimiliki Dinas

Damkar Makassar. Bahkan, mobil ambulans milik Pemkab Bantaeng kerap dipinjamkan di kabupaten tetangga bilamana ada pasien yang akan dirujuk ke Makassar.

Selain itu pula, Nurdin yang menguasai tiga bahasa asing, Inggris, Jepang dan Cina. ini berhasil meyakinkan pemerintah pusat untuk menggelontorkan dana sekitar Rp 120 miliar untuk membangun gedung rumah sakit 8 lantai berstandar internasional di kabupaten seluas 395 kilometer persegi dan dihuni sekitar 180 ribu jiwa ini.

Selama 6 tahun kepemimpinannya, Bantaeng menyabet lebih dari 50 penghargaan tingkat nasional, termasuk 4 kali berturut-turut piala adipura yang sebelumnya tidak pernah didapatkan, 3 tahun berturut-turut meraih Otonomi Award dan berhasil memenangkan Innovative Government Award (IGA) tahun 2013 yang diadakan Kementerian Dalam Negeri.

Berkat kepiawaiannya memimpin, nama Nurdin termasuk 19 tokoh alternatif oleh Komunike Bangsa Peduli Indonesia (KBPI) yang digagas pengusaha senior Sofjan Wanandi. Nama Nurdin dijadikan figur capres alternative untuk pemilihan Presiden 2019 lalu, sejajar dengan nama-nama tokoh

bereputasi seperti Jusuf Kalla, Khofifah Indar Parawansa, Chairul Tanjung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

Keberhasilan Nurdin Abdullah memenangkan Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2018 tidak bisa dilepas dari perannya sebagai Akademisi dan Birokrat. Melalui program-program populisnya Nurdin Abdullah mampu membangun pencitraan atas dirinya sebagai Kepala Daerah yang mampu mengakomodir kepentingan publik. Program- program populis inilah yang kemudian berhasil melenggangkan Nurdin Abdullah menuju Sulsel-1.

KESIMPULAN

Meski populisme tidak bertentangan dengan demokrasi, tapi populisme juga memiliki sejumlah keterbatasan. Populisme menguat ketika institusi - institusi sosial dan politik bermasalah secara fungsional, sehingga kemunculan sosok aktor politik yang kharismatik menjadi alternatif yang sulit dihindari. Tapi, politik berbasis figur akan menjadi tantangan bagi demokratisasi ketika aktor berimprovisasi melampaui kesisteman politik. Alih -alih menciptakan sistem baru yang lebih demokratis, improvisasi ini juga bisa berujung pada delegitimasi aturan main.

Dalam banyak kasus, pemimpin populis justru sekadar bertahan dalam kekuasaannya dengan membatasi kebebasan publik dan kebijakan yang tidak populer dalam demokrasi.

Nurdin Abdullah muncul dengan beberapa kebijakan-kebijakannya yang populer dan dianggap sebagai sebuah terobosan. Sebagai Kepala Daerah yang bergelar Profesor dan menguasai ilmu pertanian, Nurdin selalu punya terobosan atau pun ide di bidang pertanian dalam rangka mengembangkan potensi pertanian di wilayah Bantaeng.

Nurdin Abdullah muncul dengan sosok menjadi pemimpin yang mencoba menjadi pelayan bagi masyarakat. Nurdin Abdullah muncul dengan menggunakan populisme sebagai strategi untuk mewacanakan perubahan terhadap tatakelola pemerintahan dan pembangunan di kota Bantaeng. Strategi populisme ini juga dimanfaatkan untuk memperoleh dukungan dari masyarakat dengan memanfaatkan isu-isu yang berkaitan dengan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan, seperti isu transportasi dan fasilitas akses layanan publik, lingkungan, pertanian, sektor informal, lapangan pekerjaan, serta anti

korupsi. Isu-isu ini tidak hanya diterjemahkan sebagai untuk orang banyak (publik), tapi juga untuk memobilisasi dukungan politik yang dilakukan oleh elit dalam mempengaruhi agenda-agenda sosial, politik, dan ekonomi. Nurdin Abdullah disini melakukan popularisasi isu publik dengan cara yang berbeda, seperti dengan menggunakan birokrasi, media, relawan, untuk mempopulisasikan isu publik.

Melalui Program-program populis ini pulalah kemudian Nurdin Abdullah mampu membangun pencitraan atas dirinya sebagai Kepala Daerah yang mampu mengakomodir kepentingan publik untuk memperoleh dukungan dari masyarakat dan berhasil memenangkan Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2018.

Karena itu, kehadiran sosok pemimpin populis perlu disertai kekuatan pengimbang yang sebanding, baik secara internal maupun eksternal. Di ranah internal, pemimpin populis perlu memiliki mitra di eksekutif yang mampu mengatasi permasalahan yang hadir sebagai eksese populisme. sebaliknya, di ranah eksternal pemimpin populis juga perlu memiliki mitra di

parlemen yang kritis yang mampu mengimbangi power populismenya.

REFENSI

Ahimsa Putra HS, Demokrasi To-Manurung Falsafah Politik Dari Bantaeng, Sulawesi Selatan, Jurnal Masyarakat Indonesia Vol.4 (1) Juni 2104, Jakarta, 2014.

Anisa Nur Nia Rahmah, POLITIK POPULISME ELIT (Studi Kasus Bekerjanya Populisme Walikota Pekalongan (H.M Basyir Ahmad) Periode 2005-2010 dan 2010-2015). Universitas Gadjja Mada, Yogyakarta, 2016.

Aspinall, Edward. 2013. "Money politics: Patronage and clientelism in Southeast Asia". Naskah dipersiapkan untuk buku William Case (ed.). Handbook of Democracy in Southeast Asia. Routledge.

Boy Ricardo. 2014. Perubahan Pemilihan pada Pilkada Jakarta Putaran Kedua. Jakarta: Jurnal Politik. Vol.10/No.01/2014.

Caroline Paskarina, Berebut Kontrol Atas Kesejahteraan: Kasus-Kasus Politisasi Demokrasi Ditingkat Lokal, Penerbit Polgov, Yogyakarta, 2015

Gidron, Noam dan Bart Bonikowski. Tanpa Tahun. Varieties Of Populism: Literatur Review and Research Agenda. Working Papper Series:

Weatherhead center for Intenational Affairs Harvard university. No. 13-0004.

Kurt Weyland, 2001. Clarifying a Contested Concept: Populism in The Study of Latin America Politics. Dalam Jurnal Comparative Politics, Vol. 34, No.1 (2001).

Matthijs Rooduijn, Sarah L de Lange dan Wouter Van der Brug. 2012. A Populist Zeitgeist? Programmatic Contagion by Populist Parties in Western Europe. Journal Sage.

Michael Hastings, The Rise of Populism and Extremist Parties in Europe. 2013. The Spinelli Group.

News.detik.com. "Aksi dan ambisi nurdin bupati bergelar professor yang meraih 50 award". diunduh dari, <https://news.detik.com/berita/d-2502960/aksi-dan-ambisi-nurdin-bupati-bergelar-profesor-yang-meraih-50-award>

Pratikno & Cornelis Lay, From Populism to Democratic Polity: Problems and Challenges in Surakarta, Indonesia. Jurnal PCD Vol.3, 2011.

Savirani, A., Tornquist, O., & Stokke, K. (2014). Demokrasi di Indonesia: Antara Patronase dan Populisme. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada dan Universitas of Oslo.

Weyland, Kurt. 2001. "Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics" dalam *Comparative Politics*, Vol. 34 No. 1, Oktober. Hal. 1-22. Diunduh dari <http://www.jstor.org/stable/422412>.

Wawancara, Arsip dan Data Online